

**PEMETAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA DALAM
PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

M Ridho Abdullah

1201154272

maretinpisces@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi.Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

A wave of immigration occurred again in the 20th century. Total global flow of immigrants was massive re-occur after the occurrence of discomfort in the birthplace or place of origin of conflict such as the inability to live a life problem, a civil war, a cease-state, as well as the seizure of territory. Recorded until the current number of immigrants coming to Europe has broken 1 million people, while for immigrants who crossed Indonesia to seek asylum to Australia and Cristmast Island has reached a hundred thousand people. Most of them are citizens of the Muslim majority in the country of origin. The number of immigrants who were arrested in the city of Pekanbaru also highlighted for the attention of the Government.

For year 2014 total of immigrants in the city of Pekanbaru reached 299. The role of institutional accommodate Illegal Immigrants become very necessary thing to handle, administer, and maintain their rights to get what they expect. Agencies in the city like Rudenim, Immigration Office, and Kemenkumham and foreign agencies such as IOM and UNHCR become an indispensable institution. who need protection to live and settle. Fear the Illegal Immigrants to return the country of origin makes them not want to come back kenegara origin so that it takes the role of institutions related Illegal Immigrants. Justice must be obtained by the two aspects, namely the institutions involved as well as the illegal immigrants who are victims. Need justice together so that this issue was resolved to get justice.

Keywords: Implementation, Single Tuition, University of Riau

1.1 Latar Belakang

Para ahli sejarah dan geografi berpendapat bahwa migrasi manusia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain faktor ketidaknyamanan kondisi iklim, kurangnya persediaan makanan (ekonomi), perang (konflik senjata dan keamanan), dan faktor sosial yang meliputi tekanan politik, ras, agama, dan ideologi.¹ Dalam hal ini banyak negara sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Belum lagi migrasi ilegal bisa dihentikan, telah timbul varian baru yang kini kian mengemuka, yakni penyelundupan manusia People Smuggling, dan perdagangan manusia Human Trafficking.²

Suaka merupakan suatu perlindungan manusia yang dilindungi oleh PBB guna melindungi Hak Asasi Manusia di dunia. Setiap para Imigran berhak mendapatkan suaka dimana para manusia kapal yang mencari suaka maka berhak mendapatkan perlindungan di negara tujuan mereka. Maka dari itu negeri kanguru ini telah memiliki hak untuk perlindungan suaka. Namun entah mengapa hingga saat ini Tony Abbott selalu bertindak keras terhadap para Imigran. Tony Abbott kerap mencari sensasi di media nasional seolah-olah Indonesia yang bersalah karena tidak mampu

mengatasi manusia kapal itu masuk ke Australia.³

Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk para Imigran agar tidak ada lagi yang masuk ke wilayah Australia, namun seolah-olah Australia enggan untuk merevisi atau menghapus Undang-Undang untuk suaka, sehingga seolah-olah mereka baik dimata PBB, namun dibelakang menikam Indonesia.⁴ People Smuggling dan menjelajah bumi demi mendapatkan tempat terbaik sendiri merupakan tradisi masyarakat dunia sebelum dibentuknya aturan kewarganegaraan seseorang dalam menetap di suatu wilayah. Dahulu ini dijadikan sebuah budaya untuk menyebarkan keyakinan, kebiasaan, budaya, tradisi, dan keturunan.

Fakta yang terjadi dalam kajian Ilmu Pemerintahan adalah Pemerintah telah melaksanakan tugas dengan sebagaimana semestinya seperti melakukan deportase kepada pengungsi yang telah lulus dari bebas kriminal dan dokument resmi dari Pemerintah. Tetapi waktu yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendeportase para pengungsi ke negara asalnya terbilang cukup lama karena proses administrasi ini dapat memakan waktu sekitar 2-3 tahun dan jumlah pemulangan pengungsi tidak sebanding dengan terjaringnya Imigran yang terdampar di wilayah Perairan Riau.

Dari data yang dilansir, 49% warga negara yang mengungsi di Indonesia adalah negara yang menjadi sarang teroris. Apakah itu dikarenakan ketidaknyamanan negaranya dikarenakan teroris atau karena sarangnya konflik perbedaan keyakinan dinegaranya. Negara

¹ IOM Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, (Jakarta : 2009), hal.24

² Ibid

³ Laporan Berita Nasional pada 11 maret 2013

⁴ Ibid

tersebut memasuki 10 besar negara sarang teroris yaitu Iraq, Afghanistan, Pakistan, India, dan Somalia. Iraq menduduki peringkat pertama negara yang menjadi sarang teroris, sedangkan Afghanistan menduduki peringkat kedua yang menjadi sarang teroris.⁵ Sementara di Pekanbaru sendiri pengungsi Rudenim, Afghanistan adalah Refuges terbanyak pertama dengan total 184 orang sedangkan Iraq terbanyak keempat dengan total 35 orang. Ini sangat dikhawatirkan oleh Pemerintah bahwa mereka akan membawa ajaran Syiah atau bahkan ada diantara mereka yang diam-diam menyamar menjadi penyeludup teroris dan menyamar menjadi Imigran Ilegal padahal sebenarnya ada diantara mereka yang mempunyai ilmu Militer, bahkan dari kekhawatiran tersebut banyak media serta pejabat negara yang berpendapat sama.

No	Negara	2013			2014		
		I. Ma	I. Ke	Jumlah	I. Ma	I. Ke	Jumlah
01	Afghanistan	101	15	86	212	28	184
02	Pakistan	97	42	55	32	20	12
03	Iran	71	33	38	42	11	31
04	Iraq	27	12	15	87	52	35
05	Srilanka	5	3	2	0	0	0
06	Myanmar	12	6	6	6	6	0
07	Palestina	80	6	74	78	42	36
08	Bangladesh	7	5	2	8	8	0
09	Jordania	3	2	1	1	0	1
10	India	3	3	0	0	0	0
11	Somalia	6	6	0	0	0	0
	Jumlah	412	133	279	466	167	299

Sumber Data : Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 2013-2014

Sebelum Indonesia mempunyai Pemerintah, imigrasi merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar hukum meski masuk dari manapun dan siapapun. Seperti penjajahan Indonesia oleh Belanda dan Jepang merupakan proses Imigrasi namun jika saat ini dilakukan hal itu merupakan pelanggaran proses Imigrasi karena

⁵ Data M.Dw.com per 17 Nov 2015. Diakses pada senin 8 february 2016 pukul 8.35

tidak disertai dokument resmi. Contoh lain seperti kultur dari negara Indonesia seperti budaya dan agama merupakan contoh dari peradaban suatu imigrasi seperti wilayah Medan yang terdapat kampung India yang didominasi warga keturunan India Tamil, selain itu warga Chines Indonesia yang diketahui dahulu merupakan suatu keturunan dari negara China yang melakukan penjelajahan dunia atau bermigrasi.

Dari kebijakan publik keimigrasian dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Pekanbaru masih sangat bergantung kepada Pemerintah pusat dalam rangka malakukan upaya untuk mencegah Imigran Ilegal keluar/masuk wilayah kedaulatan negara. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk melaporkan segala bentuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Imigran. Selain itu, berikut adalah data jumlah Imigran yang masuk kedalam rumah penampungan atau Rumah Detensi Imigran di Kota Pekanbaru pada tahun 2013 dan 2014.

1.2 Perumusan Masalah

Pemetaan dan Strategi Pemerintah Kota dalam menghadapi Imigran Ilegal di Kota Pekanbaru adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan Imigran serta mengetahui sudah seberapa besar upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani Imigran tersebut. Bagaimanapemetaan lembagayang menangani Imigran Ilegal di Kota Pekanbaru?

Apa saja kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota dalam menangani Imigran Ilegal di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, penulis memiliki tujuan seperti:

a. Untuk mengkaji pemetaan lembaga Imigran Ilegal di Kota Pekanbaru

b. Guna melihat kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota dalam menangani Imigran Ilegal di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai penentuan pembeda antara rasa keadilan dengan rasa tanggung jawab

b. untuk menerapkan keadilan sosial sebagai bahan pedoman bertindak sosial dan adil

1.4 Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Alasan para Imigran Ilegal asal Timur Tengah yang pergi meninggalkan Negara asalnya sendiri adalah rata-rata dikarenakan alasan keamanan atau kondisi negaranya yang sedang dalam keadaan perang atau sedang terjadi konflik bersenjata di negara mereka, namun hal lain yang membuat warga negara Timur Tengah mencari suaka ke beberapa negara maju adalah karena negaranya tidak lagi mampu

1.5 Kerangka Teori

Motif migrasi International selama ini disebabkan oleh faktor pendorong dari negara asal dan faktor penarik dari negara tujuan. Faktor pendorong atau push faktor seperti perang, diskriminasi, dan bencana

alam kemudian menyebabkan banyaknya warga negara yang secara terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan stabil di negara lain. Demikian halnya dengan faktor penarik dari negara tujuan atau pull faktor yang kemudian memunculkan keinginan warga negara untuk menuju negara tujuan yang relatif lebih maju dan berkembang demi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Adapun negara tujuan dari warga negara yang melakukan migrasi International, baik yang disebabkan oleh push faktor maupun pull faktor, sebagian besar adalah negara yang mempunyai daya tarik dibidang keberhasilan ekonomi, kesejahteraan sosial, maupun kestabilan politik seperti Australia, Amerika Serikat, Canada, Prancis, Jerman, Inggris, serta Selandia Baru. Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para Imigran International dari berbagai negara. Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para Imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu.

1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan suatu bentuk tindakan atau refleksi manusia yang ingin meraih posisi-posisi dalam stratifikasi sosial.⁶ Sebagai bentuk kejadian, ada dua kategori, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi akibat adanya pertentangan antara dua keinginan, pilihan yang

⁶ Max Weber. Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer. Jakarta. Kencana Group. 2009 hal 44

berbeda-beda, harapan-harapan atau masalah lainnya. Adapun konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seseorang tokoh dengan suatu luar dirinya sendiri, mungkin dengan lingkungan alam atau lingkungan sekitarnya.⁷

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.⁸ Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, Pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah sosial ada atau muncul ketika suatu masyarakat tertentu, atau paling tidak sebagian orang dalam komunitas tersebut, merasa dipecah atau terancam atau merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas atau praktek-praktek kehidupannya yang berlaku.⁹ Dari kutipan ini secara implisit masalah akan muncul dalam kehidupan masyarakat karena adanya suatu ketidakharmonisan atau rasa kurang toleransi dalam menghargai hak-hak orang lain sehingga merasa terganggu.

2. Peran Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.¹⁰ Yang mana sesungguhnya keadilan bersifat tanpa membeda-bedakan siapa, darimana, dan untuk apa. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang.¹¹ Karena itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan apabila hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

Secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari keadilan yang lebih besar.¹² Keutamaan keadilan diperlukan tujuan dengan mempertimbangkan suatu penegasan ditafsir dan dinilai, perlu adanya mempertimbangkan peran dan prinsip-prinsip keadilan. Identitas kepentingan terjadi karena kerja sama sosial yang memungkinkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang daripada jika masing-masing hidup sendirian. Adanya konflik kepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan.

1.6 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan dari naskah

⁷ Stanton dalam Nurgiyantoro 1995. Hal 124

⁸ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. Hal 362

⁹ Spector and Kitsuse dalam D. Stanley Eitzen. Social Problems. New Jersey: Aldine de Gruyter. 1987. Hal 67

¹⁰ Ibid. Hal 3

¹¹ Ibid. Hal 4

¹² Ibid. Hal 4

wawancara, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹³

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melakukan keadaan aspek subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporan suatu kejadian tanpa suatu intervensi ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif, antara lain :¹⁴

1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemisahan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
4. Tahap penarikan kesimpulan/ verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, defenisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Pendekatan kualitatif, lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena itu urutan kegiatan-kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai *grounded theory research*..¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Rudenim, Kantor Imigrasi Kelas 1, dan KemenkumHam. Penelitian dilakukan guna mengetahui apa yang telah dilakukan lembaga tersebut, selain itu juga dilakukan pemetaan untuk mengetahui data yang lebih

¹³ Suyanto Bagong. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. Kencana. 2010. Hal 5

¹⁴ Prof. Djam'an Satori dan Dr. Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. CV Alfabeta. Bandung. 2010. Hal 39

¹⁵ Ibid

akurat. hubungan atau relasi antara dinas dan badan tersebut dalam kasus menangani Imigran di Kota Pekanbaru.

1. Rudenim di Jalan OKM Jamil No.2A belakang MTQ Pekanbaru, Pekanbaru.
2. Kantor Imigrasi Kelas 1 di Jalan Teratai No 87 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.
3. Kemenkum Ham di Jalan Jendral Sudirman no 233 Pekanbaru.
4. Kesbangpol di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru
5. Kantor DPRD di Jalan Jendral Sudirman No 462 Pekanbaru.
6. Kantor IOM International Organization for Migration di Jalan Ketitiran No 26b
7. Kantor UNHCR Pekanbaru di Jalan Ketitiran No 26b

4. Informan Penelitian

Informan peneliti merupakan orang yang benar-benar atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan, proses penelitian langsung dari suatu informan ke informan lainnya.

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.¹⁶ Oleh sebab itu, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui secara pasti mengenai pemetaan kelembagaan Pemerintah kota dalam penanganan

Imigran Ilegal di Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ibu Tri Rahayu SH. Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Wilayah (Rudenim) Kota Pekanbaru
2. Ibu Enimarini, SH. MH. Kepala Sub Bidang Intelijen dan Penindakan wilayah (Kemenkum HAM) Kota Pekanbaru
3. Bapak Zakaria, SH M.APKasi Washakim Kantor Imigrasi Kelas 1Pekanbaru wilayah (Kantor Imigrasi Kelas 1) Kota Pekanbaru
4. Teddy Kuantono Achmad, SE. MM Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian wilayah (Kantor Imigrasi Kelas 1) Kota Pekanbaru
5. Roni Sastrawan, S.Psi Kepala Urusan Kepegawaian wilayah (Kantor Imigrasi Kelas 1) Kota Pekanbaru
6. H. Firdaus, ST. MTWalikota Pekanbaru wilayah (Kantor Walikota) Kota Pekanbaru
7. Ir. Hotman Sitompul Anggota DPRD Komisi 1 Kota Pekanbaru wilayah (Kantor DPRD) Kota Pekanbaru
8. Syamsurizal, SE Kasubit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama wilayah (Kesbangpol) Kota Pekanbaru
9. Drs. Zailis Nawas, S,IP. M.Pd Kabid Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Pekanbaru wilayah (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Pekanbaru

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Sumber data

¹⁶ Ibid hal 97

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.¹⁷ Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

Data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya,¹⁸ antara lain meliputi: wawancara ataupun catatan tertulis Terkait Pemetaan dan Kelembagaan Pemerintah Kota dalam Menangani Imigran Ilegal Di Kota Pekanbaru

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, koran, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.¹⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data sekunder, baik yang berupa catatan-catatan, laporan-

laporan, dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini, dan penulis juga menghimpun data primer untuk mendukung penelitian. Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan resmi yang dibuat oleh sumber-sumber yang berwenang yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Data ini diperoleh dengan mengumpulkan dan mencatat laporan-laporan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, surat kabar harian lokal dan nasional, dan data online mengenai penanganan Imigran di Kota Pekanbaru.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan maupun kondisi riil yang dapat langsung dilokasi penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan beliau tersebut. Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:²⁰

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu mengumpulkan informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yaitu sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mungungkan faktor penyebabnya, dan menemukan

¹⁷ Lofland dalam Prof. DR. Lexy J Moloeng. MA Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2010 hal 157

¹⁸ Marzuki M.M. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama. 2002. Hal.55.

¹⁹ Dr. Ulber Silalahi, MA. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. 2010. Hal 291.

²⁰ Ibid hal 248

kaidah-kaidah yang mengaturnya.²¹ Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.²²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Partisipasi pasif berarti peneliti datang ketempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.²³ Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴ Selain itu wawancara atau teknik pengumpulan data secara bertatap muka secara langsung dengan responden guna mengkonfirmasi data. Selain itu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti.²⁶ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁷ Penelitian observasi dan wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen.

7. Analisis Data

Dalam data penelitian jenis kualitatif ini peneliti menerjemahkan dan menguraikan data secara deskriptif sehingga gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian ini.

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, peneliti memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian baru diolah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang penulis

²¹ Prof. Dr. Emzir, M.Pd. Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisa Data. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2012. Hal 36.

²² Ibid hal 226

²³ Ibid hal 227

²⁴ Ibid hal 186

²⁵ Marzuki M.M. Metodologi Riset. Yogyakarta: Pt Prasetya Widya Pratama. 2002. hal.66

²⁶ Widodo. Cerdik Menyusun Proposal Penelitian. Jakarta. Magna Script Publishing. 2012. Hal.61

²⁷ Prof. DR. Sugiyono. Metode Penelitian. Bandung. CV Alfabeta. 2008 hal 240

kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman.²⁸

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IMIGRAN ILEGAL

3.1 Sistem Aturan Rudenim

Dalam Pelaporan Rudenim, Kasub mempunyai bawahan dan anggota-anggota yang bertugas dalam membantu dibidangnya masing-masing seperti pada halnya yaitu organisasi, instansi Pemerintahan pun mempunyai proses birokrasi yang tersistematis. Dalam lembaga sendiri, Rudenim dikepalai oleh seorang kepala Rudenim dan untuk dibawah kepala Rudenim di ketuai oleh Kasubag Tata Usaha yang mana anggotanya terdapat Karus Kepegawaian, Karus Umum dan Karus keuangan. Kepala Rudenim juga mempunyai tiga bawahan yang langsung bertugas dibidang Rudenim yang terbagi dari Kasi Reg.Adm dan Pelaporan, Kasi perawatan dan kesehatan, dan Kasi keamanan dan ketertiban.

Kasi Reg. Adm dan Pelaporan mempunyai bawahan yang bertugas dibidang Kasubsi Registrasi dan

Kasubsi Adm dan Pelaporan. Bidang ini mempunyai tugas untuk meregister setiap Imigran Ilegal yang telah terdata resmi sebagai pencari suaka atau terdaftar dalam status pengungsi. Selain itu mereka meregister jumlah imigran setiap bulannya yang masuk dan yang keluar, dan segala aktivitas data imigran selama masih di tempat penampungan.

1. Sebagai bidang yang mendata jumlah Imigran Ilegal setiap bulannya yang telah terdata sebagai pencari suaka
2. Meregister jumlah imigran yang masuk dan keluar setiap bulannya di penampungan
3. Sebagai pemeran inti bagi pengkoordinir data dan pemberi data bagi pihak-pihak resmi yang telah diatur oleh Pemerintah

Kemudian ada Kasi Keperawatan dan Kesehatan yang mempunyai bawahan Kasubsi Perawatan dan Kasubsi Kesehatan. Bidang ini mengurus dan mengatur Imigran Ilegal yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan perawatannya. Selain itu juga mereka akan memantau Imigran Ilegal yang diperlu perawatan dirumah sakit seperti sakit parah atau akan melahirkan. Segala dana yang dikeluarkan untuk kesehatan dan perawatan telah ditanggung sepenuhnya oleh IOM.

1. Pemantau dan pelaksana kesehatan bagi para deteni, jika masih bisa dirawat di pengungsian atau mengalami sakit ringan
2. Pihak yang mengurus rumah sakit deteni dan koordinir langsung terhadap rumah sakit
3. Pihak yang langsung menginformasikan kepada Pihak IOM jika diperlukan dana untuk biaya rumah sakit.

²⁸ Bodgan, Robert C and Biklen, Sari Knopp, 1982. *Qualitative Research for Education : An Introduction to theory and methods*, Bacon : Allyn and Bacon, Inc.

Selanjutnya ada Kasi Keamanan dan Ketertiban yang mempunyai bawahan kasubsi keamanan dan kasubsi ketertiban. Bidang ini bertugas sebagai pihak yang mengurus kedisiplinan, tata tertib, peraturan, dan norma-norma yang berlaku selama masih di tempat penampungan. Selain itu jika terjadi kasus perkelahian, pelecehan sexual maka akan ditindaki seperti diberi sanksi akan dicabut statusnya sebagai pengungsi atau pencari suaka atau langsung dideportase ke negara asalnya. Namun untuk sanksi ringan jika para imigran terlambat dalam masuk pada saat jam istirahat maka akan diberi peringatan, jika sampai 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan maka langsung diusut untuk diurus proses deportase ke negara asal. Namun jika dalam jangka 1 tahun melakukan pelanggaran ringan kurang dari 3 kali maka pelanggaran dianggap gugur.

3.2 Sistem Aturan Kantor Imigrasi Kelas 1

Kelembagaan yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas 1 mempunyai bidang-bidang seperti dipimpin oleh kepala kantor, kemudian dibawahnya terdapat Sub bag tata usaha yang dibawah oleh urusan kepegawaian dan urusan keuangan. Bagian ini mengurus segala bentuk pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 untuk dilaporkan serta pegawai seperti tata tertib kerja dan segala tanggung jawab pegawai di Kantor Imigrasi Kelas 1.

Kemudian ada seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian. Bagian ini mengurus segala tindak koordinasi Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pemerintah pusat guna melaporkan jumlah imigran yang terdapat di Kota Pekanbaru. Selain itu bagian ini juga mengurus warga Kota

Pekanbaru dalam mengurus paspor, untuk perjalanan keluar negri baik itu wisata, bekerja, pelajar, ataupun beribadah. Bagian ini juga harus melaporkan jumlah berapa jumlah warga negaranya yang akan keluar negri untuk tujuan-tujuan tersebut ke duta besar masing-masing negara tujuan.

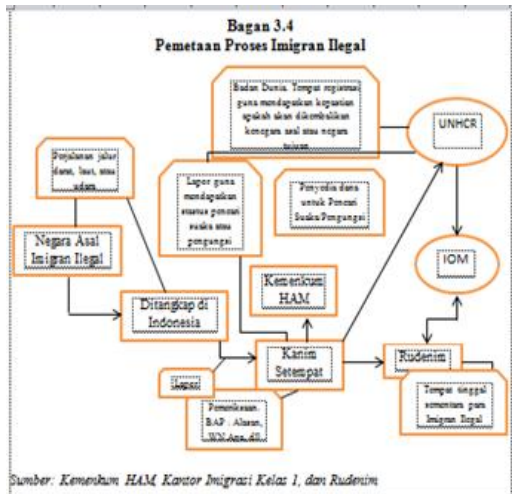
Kemudian ada seksi lalu lintas keimigrasian yang dibawahnya subseksi Lintas batas dan subseksi perizinan keimigrasian. Bagian ini mengurus patroli atau siaga di daerah perbatasan guna menangkap para penjahat atau aktor-aktor yang menyalahgunakan lalu lintas keimigrasian. Seperti penangkapan penjahat narkoba, penyelundupan barang-barang tanpa izin, terorism, dan Imigran Ilegal. Bagian ini disiagakan di bandara, jalur darat, dan jalur laut yang menjadi lintas orang luar masuk ke Indonesia tanpa menyertai document-document resmi. Bagian ini melibatkan aparat-aparat terkait seperti TNI atau POLRI.

Selanjutnya ada seksi status keimigrasian. Dibawahnya terdapat bagian Subseksi penentuan Status keimigrasian dan Subseksi penyidikan peneleahan status keimigrasian. Bagian ini mengurus segala bentuk seperti pembuatan paspor yang mana sebelumnya terdapat Warga Negara Indonesia yang hendak bepergian keluar negri. Bagian ini juga terdapat beberapa tes seperti tes darah guna mencegah Warga Negara Indonesia

3.3 Sistem Aturan Kemenkum Ham

Kemenkum HAM sebagai lembaga diatas Kanim dan Rudenim, berkewajiban untuk memantau ruang gerak lembaga dibawahnya seperti melihat kondisi Pengungsi ataupun memantau kinerja pegawai. Laporan

perkembangan harus diserahkan oleh setiap sub dan Karus serta setiap lembaga untuk dijadikan bahan laporan kepusat oleh Kemerkum HAM. Devisi Keimigrasian adalah devisi yang bertugas sebagai devisi yang mengurus untuk aspek imigrasi dalam segala bidang seperti halnya Imigran Ilegal.



Sumber: Kemerkum HAM, Kantor Imigrasi Kelas 1, dari Rudenim

Menurut teori Dualisme, Hukum International dan hukum Nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum International dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya Hukum International dalam lingkungan Hukum Nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah Hukum Nasional suatu negara.

Menurut teori Monisme, Hukum International dan Hukum Nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum International itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu Hukum Nasional untuk urusan luar negeri. Teori ini, Hukum Nasional kedudukannya lebih rendah dibanding

dengan Hukum International. Hukum Nasional tunduk dan harus sesuai dengan Hukum International.

4. Penutup

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan sikap profesional dan sikap tenggang rasa terhadap para pejabat Imigrasi agar para Imigran Ilegal tidak takut kepada petugas Imigrasi, dan juga petugas imigrasi harus bisa merangkul para imigran seolah-olah kawan atau orang yang terzholimi. Karena sesungguhnya mereka adalah korban, bukan orang yang patut untuk disalahkan. Petugas imigrasi juga harus bisa melakukan metode bagaimana agar para imigran menganggap Petugas imigrasi sebagai kawan bukanlah orang yang pantas untuk ditakuti. bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan dipertanggung jawabkan.

Selain itu para petugas imigrasi harus dilakukan pengawasan atau inspeksi mendadak oleh para pejabat Imigrasi guna mendisiplinkan tugas dan tupoksi mereka sebagai petugas imigrasi. Selain itu diperlukan kamera pengawas disetiap sudut ruangan tempat bekerja dan tempat beraktivitas agar para petugas imigrasi dapat bekerja lebih disiplin serta tidak menunda-nunda segala tanggung jawab yang diberikan guna mempersingkat waktu. Sehingga waktu yang seharusnya diberikan untuk menyelesaikan tugas dalam 3 tahun, bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun atau kurang dari 2 tahun.

Saran

Petugas imigrasi bukan hanya mereka yang mempunyai gelar Sarjana

Hukum atau mereka yang hanya mengerti birokrasi saja, namun dibutuhkan mereka yang mengerti akan ilmu jiwa seperti ilmu psikolog atau seorang sosialis. Disini bertujuan agar mereka dapat menjadikan petugas menjadi orang yang bisa melindungi mereka dan mendengar segala bentuk masalah-masalah mereka. Atau bahkan perlu penambahan anggota yang betugas demikian.

Selain itu petugas harus juga mengerti minimal bahasa Inggris seperti speaking dan writing. Apalagi Pegawai di Lembaga tersebut berhubungan langsung terhadap orang asing. Dan para imigran pun terkadang tidak paham dengan bahasa Inggris. Maka seharusnya diperlukan tambahan anggota yang mana masing-masing mempunyai kualitas speak and write bahasa masing-masing para imigran sesuai dengan daftar negara yang sering menjadi daftar Imigran Ilegal di tempat penampungan .

Selain bahasa Inggris, kemampuan pegawai dalam berbahasa Imigran di Pekanbaru yang mayoritas berbahasa Arabic harus dimiliki oleh pegawai terutama di Kantor Imigrasi dan Rudenim karena lembaga ini memang berhubungan langsung kepada para Pencari Suaka. Para pencari suaka juga kerap bermasalah dengan tidak bisanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga terjadi Miss Komunikasi antara pegawai dengan pencari suaka.

Pemerintah harus bisa menyesuaikan tes kepegawaian sesuai dengan tupoksinya dan bidangnya. Jangan orang lulusan matematik diletakkan dilembaga yang berkaitan dengan masalah sosial, jangan karena tes hitung-hitung yang baik langsung lolos tes tanpa melakukan sistem wawancara. Karena saat ini kebanyakan tes kepegawaian hanya

berpedoman pada bidang science dan mathematics atau bahkan mencari keahlian kepintaran dari sisi lain. Harus ada sistem perekrutan yang lebih selektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an:

Al-Qur'an, surah Surah Ash-Shaff ayat 14

Al-Qur'an, surah AN-NAHL ayat 90

Buku:

Ahmad, Abu. 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineka Cipta

Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Herimanto dan Winarno. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta. Bumi Aksara.

J Moloeng, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Kitsuse, and Spector dalam D. Stanley Eitzen. 1987. *Social Problems*. New Jersey: Aldine de Gruyter.

M.Poloma, Margaret. 1979. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. CV Rajawali.

M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pt Prasetya Widya Pratama.

Manning, Patrick. 2005 *Migration in World History*. New York: Routledge.

Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2005. *Pengantar Sosiologi*

- Politik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stanley, D Eitzen. 1987 *Social Problems*. New Jersey: Aldine de Gruyter.
- Stanton dalam Nurgiyantoro. 1995
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung. CV Alfabeta.
- The Encyclopedia Americana International Edition, 1975
- Weber, Max oleh Novri Susan. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup (Kencana).
- Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta. Magna Script Publishing.
- Jurnal :**
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2014
- Erick, Richard Andrea, Peranan International Organization For Migration dalam menangani imigran ilegal asal timur-tengah di Indonesia
- Herdianzah, Rifki, Kebijakan Pemerintah Australia Terkait Permasalahan Irregular
- IOM. 2009. Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia. Jakarta Maritime Arrivals
- Rizki Amrullah, Muhammad. 2014. Peran International Organization for Migration dalam menangani masalah pengungsi Afghanistan di Indonesia.
- Roberts, Anita. 2002. Imigran Ilegal di Indonesia: dari perspektif Republik Indonesia.
- Website :**
- http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi diakses pada 21 Desember 2014
- <http://www.unhcr.ch> diakses pada 17 Maret 2015
- www.immi.gov.au, 2013 diakses pada 10 April 2015
- IOM, "Profil IOM" <http://www.iom.int>. Diakses pada 17 Oktober 2015
- Skripsi :**
- Yenni Delfita Sari. 2011. Respon International Organization for Migration (IOM) Terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Australia Kepada Imigran Ilegal dari Timur Tengah Tahun 2009. Skripsi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Media Lain :**
- Metro TV. dilihat pada hari Ahad 22 Nov 2015 pukul 21.23 WIB
- M.DW.com diakses pada senin 8 Febuary 2016
- Koran Harian Detil, dilihat pada senin 4 January 2

